

**KESADARAN NASIONAL
DAN SEKOLAH SAREKAT ISLAM
(1900 – 1942)**

MAKALAH
disampaikan dalam Penataran Pengayaan Kurikulum Mulok
Sejarah Perjuangan Syarikat Islam (SPSI)
di Aula Gerkopin, 13 Januari 2013

oleh:

Mumuh Muhsin Z.



**JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2013**

**KESADARAN NASIONAL
DAN SEKOLAH SAREKAT ISLAM
(1900 – 1942)**

oleh:
H. Mumuh Muhsin Z.
(Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)
mumuhmz@unpad.ac.id

ABSTRAK

Peranan agama dalam membangkitkan kesadaran nasional, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk gerakan nasional yang lebih konkret, merupakan gejala umum dalam sejarah. Hal seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya, seperti di Belanda, Inggris, Amerika Utara, dan negara-negara lainnya. Faktor yang sangat penting dalam membangkitkan nasionalisme negara-negara tersebut adalah faktor agama. Sarekat Islam sebagai organisasi politik pertama di Indonesia sangat gencar membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Semangat ini dijadikannya instrumen untuk memerdekakan diri. Salah satu alat yang digunakan SI untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu adalah sekolah. Oleh karena itu Sarekat Islam pun pada tahun 1921 mendirikan sekolah sebagai alat perjuangan.

Lahirnya Nasionalisme Indonesia

Tidak sederhana menentukan secara pasti kapan nasionalisme Indonesia itu lahir dan siapa yang memelopori kelahirannya. Tampaknya kesulitan ini sama halnya dengan kesulitan orang untuk memberikan batasan mengenai pengertian nasionalisme itu sendiri. L. Stoddard mengatakan bahwa persoalan mengenai “apakah nasionalisme itu”, selalu saja menjadi bahan perdebatan yang tak ada habis-habisnya.¹ Banyak teori telah dikemukakan. Tak henti-hentinya orang mencari dan mengidentikkan nasionalisme dengan kesamaan bahasa, kebudayaan, ras, politik, geografi, ekonomi, atau agama. Ini semua mungkin bisa dipandang sebagai faktor-faktor yang menentukan atau memberi bantuan kepada

¹ Lothrop Stoddard. 1966. *Dunia Baru Islam. (The New World of Islam)*. Djakarta: Panitia Penerbit Menko Kesedjahteraan, hlm. 137.

pembentukan kesadaran nasional. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa nasionalisme itu adalah “suatu keadaan jiwa, suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia, sehingga mereka memberikan suatu kebangsaan”; “nasionalisme adalah rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa”. Pengertian “bangsa” ini sesuai dengan pikiran rakyat atau masyarakat yang bergabung bersama dan tersusun dalam satu pemerintahan dan berdiam bersama dalam satu wilayah tertentu. Bila cita-cita nasional telah menjadi kenyataan, maka terbentuklah suatu badan politik yang dikenal sebagai “negara”.²

Umumnya dikatakan bahwa pergerakan nasional dimulai sejak tahun 1908, yaitu tahun berdirinya Budi Utomo.³ Terhadap masalah ini, ada sebagian orang yang tidak setuju dijadikannya kelahiran Budi Utomo sebagai permulaan kebangkitan nasional. Kelompok tersebut selanjutnya menuntut agar tanggal 16 Oktober 1905 haruslah diakui sebagai permulaan kebangkitan nasional Indonesia,⁴ karena pada saat itu telah berdiri sebuah organisasi yang bersifat nasional, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI). Pendapat ini didasarkan atas kenyataan objektif bahwa secara temporal SDI muncul lebih awal. Aspek lain adalah ruang gerak, karakter, dan partisipan organisasi itu. Budi Utomo merupakan organisasi moderat yang sempit, yaitu keanggotaannya semata-mata untuk masyarakat priyayi Jawa dan tidak melakukan pembaharuan-pembaharuan radikal untuk kejayaan seluruh rakyat Indonesia,⁵ sedangkan Sarekat Dagang Islam mempunyai basis massa rakyat (tidak terbatas pada status sosial tertentu), juga tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu.⁶

² *Ibid.*

³ Sartono Kartodirdjo. 1972. “Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad-19 dan Abad-20”, *Lembaran Sedjarah*, Nomor 8 Djuni. Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, hlm. 51; juga Aminuddin Nur. *Pengantar Study Sedjarah Pergerakan Nasional*. Djakarta: Pembimbing Massa, hlm. 5.

⁴ Deliar Noer. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900 – 1942)*. Jakarta: LP3ES, hlm. 115; juga A. Hasymi. 1986. “Syarikat Islam: Organisasi Modern Tertua di Aceh”, *Harmonis*, No. 335 thn. XVI-Thn. RI XLI, 1-4 Maret – 19 Jumadil-akhir 1406, hlm. 8.

⁵ Savitri Prastiti Scherer. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Terjemahan S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 20.

⁶ Lihat Anggaran Dasar SDI dalam A.P.E. Korver. 1985. *Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil?* Terjemahan Grafitipers. Jakarta: Grafitipers, hlm. 202 – 207.

Terlepas dari pilihan mana yang lebih tepat di antara kedua peristiwa tersebut untuk dijadikan *moment* awal dari pergerakan nasional, yang jelas “kesadaran nasional” yang merupakan bentuk embrional dari gerakan nasional telah muncul jauh sebelum tahun 1908.

Adapun yang menjadi “kata kunci” gerakan nasional adalah adanya keinginan untuk beremansipasi.⁷ Keinginan ini muncul karena hilangnya keseimbangan (*equilibrium*) dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dominasi asing. Keinginan untuk beremansipasi ini diwujudkan dalam bentuk pergerakan yang diinstitusikan dalam berbagai bentuk organisasi sebagai alat yang sudah merupakan fenomena historis dalam dasawarsa-dasawarsa pertama dari abad ke-20.

Nasionalisme Indonesia merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonial bangsa Barat.⁸ Dalam konteks situasi kolonial ini, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap syarat-syarat politik, ekonomi, dan sosial yang khusus ditimbulkan oleh situasi kolonial tersebut. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, nasionalisme dan kolonialisme tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bahkan keduanya saling memengaruhi secara timbal balik.⁹ Di samping sebagai jawaban terhadap syarat-syarat politik, ekonomi, dan sosial, juga tidak kalah pentingnya faktor budaya dan agama. Bahkan faktor yang disebut terakhir ini merupakan faktor yang amat penting sebagai pembangkit kesadaran nasional.

Peranan agama dalam membangkitkan kesadaran nasional, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk gerakan nasional yang lebih konkret, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya,

⁷ Emansipasi pada dasarnya mempunyai gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, cita-cita suatu pengelompokan orang-orang tertentu menuju penjabaran diri dan perkembangan batin. Kedua, berusaha agar diakui sebagai bagian masyarakat yang sepenuhnya dan dengan demikian memiliki pula peluang dan hak yang sama seperti golongan-golongan yang lebih diistimewakan dalam masyarakat itu. Ketiga, mengusahakan pemutusan hubungan dengan golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Gejala-gejala tersebut terjadi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Lihat A.P.E. Korver. 1985. *Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers, hlm. 1.

⁸ Sartono Kartodirdjo. 1972. *op. cit.*, hlm. 50.

⁹ Suyatno. 1985. “Timbul dan Perkembangan Nasionalisme Indonesia”, *Basis*, November-xxxiv-II, hlm. 417.

seperti di Belanda, Inggris, Amerika Utara, dan negara-negara lainnya. Faktor yang sangat penting dalam membangkitkan nasionalisme negara-negara tersebut adalah faktor agama.

Gerakan revolusi Belanda melawan Spanyol pada abad ke-16 merupakan gerakan keagamaan (*religious movement*), yang kemudian diikuti oleh gerakan nasionalis Inggris pada abad ke-17, suatu gerakan nasionalis yang amat penting di Eropa, dan lahir sebagai revolusi kaum Puritan (*the Puritan Revolution*).¹⁰ Demikian juga halnya dengan revolusi di Amerika Utara dipelopori oleh kaum Puritan.¹¹

Di Indonesia, pemeluk Islam merupakan mayoritas, dan agama Islam merupakan faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Bahkan dapat dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia dimulai sebenarnya dengan nasionalisme Islam.¹²

Pada masa itu Islam adalah identik dengan kebangsaan. Dalam hal ini, Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa konsep religius secara besar-besaran membangkitkan sentimen nasional dan membina bentuk solidaritas yang efektif.¹³ Hal serupa dikemukakan juga oleh George McTurnan dengan mengatakan:

*“One of the most important factors contributing to the growth of an integrated nationalism was the high degree of religious homogeneity that prevailed in Indonesia, over 90 percent of the population being Muhammedan.”*¹⁴

(Salah satu di antara faktor-faktor terpenting yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan suatu nasionalisme yang terintegrasi adalah tingginya derajat homogenitas keagamaan yang ada di Indonesia, yang 90 persen lebih dari penduduknya beragama Islam).

¹⁰ Anton Timur Djailani. t.t. “The Background of Indonesia Nationalism”, *Mizan: Indonesian Forum for Islamic and Social Studies*, hlm. 19.

¹¹ Hans Kohn. 1976. *Nasionalisme: Arti dan Sejarah*. Terjemahan Sumantri Mertodipuro. Jakarta: Pembangunan, hlm. 25.

¹² Anton Timur Djailani. “The Sarekat Islam Movement: Its Contribution to Indonesian Nationalism”, *Thesis M.A.*, dalam Deliar Noer. 1980. *op. cit.*, hlm. 8.

¹³ Sartono Kartodirdjo. 1972. *op. cit.*, hlm. 63.

¹⁴ George McTurnan Kahin. Kahin, George McTurnan. 1959. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca-New York: Cornell University Press, hlm. 38.

Adapun yang menyebabkan Islam demikian dominan dalam perannya membangkitkan kesadaran nasional dan demikian militan dalam melancarkan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah kolonial paling tidak didasarkan pada tiga hal, sebagaimana diungkapkan oleh Anton Timur Djaelani sebagai berikut:

*“Religion, and in this case of Indonesia it was Islam, formed a stimulating factor for the emergence of nationalism. It was firstly that aversion to any foreign domination stimulated by Islam, secondly the strong sense of superiority which Islam gave to its followers, and thirdly its politico-religious nature and its ideal of world supremacy, that made Islam the most important factor in the emergence of nationalism in Indonesia.”*¹⁵

(Agama, dan dalam hal ini di Indonesia adalah Islam, membentuk suatu faktor perangsang untuk timbulnya nasionalisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bahwa keengganan terhadap dominasi asing telah didorong (distimulasi) oleh Islam; kedua, perasaan superioritas yang kuat yang diberikan Islam kepada penganut-penganutnya; ketiga, sifat politik-keagamaan serta cita-citanya tentang supremasi dunia. Semua itu menjadikan Islam sebagai faktor terpenting dalam membangkitkan nasionalisme Indonesia).

Faktor ekonomi juga merupakan bagian yang cukup penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Di negara-negara jajahan, nasionalisme adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme. Reaksi ini berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus-menerus. Penjajah melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan ekonominya. Motif ekonomi pada situasi kolonial menjadi faktor dominan untuk menentukan hubungan antara golongan-golongan sosial. Pertentangan kepentingan menyebabkan kondisi hidup rakyat terbelakang, karena cara-cara produksi yang lama tidak mampu menghadapi kapitalisme kolonial yang mempunyai organisasi dan teknologi modern, dan mampu mengubah keadaan ekonomi yang ada. Kedudukan yang menguntungkan penjajah itu diperoleh melalui eksploitasi dan diskriminasi. Dengan jalan demikian usaha-usaha ke arah emansipasi ekonomi selalu ditekan. Semua pengalaman yang mengecewakan, sebagai akibat sistem sosial-ekonomi yang menghalangi usaha perekonomian

¹⁵ Anton Timur Djailani. t.t. “The Background ...”, hlm. 20.

bangsa Indonesia, mendorong timbulnya solidaritas. Solidaritas ini diwujudkan dengan bentuk reaksi yang diucapkan dengan agitasi yang keras terhadap orang-orang asing. Kondisi ekonomi yang begitu memburuk menyebabkan pergerakan-pergerakan menjadi radikal dan revolusioner.

Timbul dan berkembangnya organisasi-organisasi sebagai institusionalisasi tindakan-tindakan sosial yang ditujukan ke arah kepentingan ekonomi, politik, dan kebudayaan merupakan fenomena sosial-historis dalam pergerakan nasional. Ketegangan-ketegangan sosial sebagai produk sistem kolonial mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok menurut stratifikasi dan diferensiasi baru. Dengan jalan memperkenalkan sistem produksi dan teknologi modern serta sistem pendidikan dan organisasi pemerintahan Barat, maka masyarakat kolonial dengan strukturnya yang masih bersifat feodal mengalami modernisasi dengan semua perubahan sosial yang menyertainya. Hal ini menyebabkan kekuasaan dan prestise kaum feodal menjadi lemah, dan kekuatan-kekuatan ini pindah kepada kaum intelektual baru.¹⁶

Pertentangan kebutuhan sosial dengan kaum penjajah menyebabkan munculnya organisasi-organisasi nasionalis. Karena perbedaan rasial, maka pertentangan ini menjadi semakin serius. Organisasi itu fungsinya menjadi lebih nyata dan menunjukkan perbedaan kepentingan-kepentingan tersebut secara lebih jelas. Jadi, organisasi-organisasi itu boleh dikatakan membuat suatu jalan untuk membangun suatu kekuatan sosial.¹⁷

Demikian juga dengan faktor budaya. Dengan adanya politik asosiasi kebudayaan yang berusaha untuk “membelandakan” orang-orang Indonesia melalui pendidikan, bahasa, kesenian, agama, dan yang lainnya, kemudian muncullah orang-orang yang – meminjam istilah George McTurnan Kahin – “lebih Belanda daripada orang Belanda” (*more Dutch than the Dutch*).¹⁸ Hal semacam ini merupakan ancaman yang serius bagi orang-orang yang sadar akan eksistensi dirinya, sehingga mereka berupaya untuk membendung arus Barat itu dengan di-

¹⁶ Sartono Kartodirdjo. 1972. *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ George McTurnan Kahin. *op. cit.*, hlm. 60.

bentuknya organisasi-organisasi yang berorientasi budaya. Kaum nasionalis menolak ide asimilasi dalam rangka *Pax Neerlandica*.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam membangkitkan kesadaran nasional adalah tertanamnya kesadaran sejarah khususnya terhadap momentum yang dianggap sebagai puncak-puncak perjalanan sejarah sebuah bangsa. Untuk kasus perjalanan sejarah Indonesia, antara lain pada abad ke-9 dan abad ke-13 tercatat ada dua kerajaan besar yang mencapai kegemilangan yang luar biasa, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.¹⁹ Kedua kerajaan ini sering dijadikan rujukan dan pijakan moral untuk meraih kegemilangan di masa depan. Menurut Ernest Renan, seorang filosof Perancis, “tercapainya kegemilangan di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya kembali di masa depan” merupakan alat pemersatu bangsa yang sangat mendasar.²⁰ Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa setiap faktor tersebut di atas pada dirinya tidak cukup untuk menjamin persatuan bangsa, sedangkan di pihak lain perbedaan-perbedaan dalam faktor tersebut di atas juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh.²¹

Di samping kondisi-kondisi di dalam negeri seperti tersebut di atas, perkembangan di luar negeri pun ikut memengaruhi terciptanya kesadaran nasional. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) merupakan titik tolak hancurnya mitos lama yang mengatakan bahwa bangsa kulit putih adalah bangsa yang tak terkalahkan. Demikian juga gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, dan gerakan-gerakan nasional di negara-negara tetangga, seperti di India dan Filipina memberi pengaruh besar terhadap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Menurut ke-

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

²⁰ F. Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Binacipta, hlm. 126. Juga Meriam Budiardjo. 1978. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hlm. 44.

²¹ *Ibid.*, hlm. 43.

nyataannya, kejadian-kejadian tersebut mempertinggi tingkat kesadaran nasional dan menyebabkan bangsa Indonesia memiliki rasa harga dirinya kembali.²²

Ringkasnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk melihat faktor mana yang terpenting yang mendukung atau merupakan segi-segi integritas dari nasionalisme Indonesia. Pertama, faktor internal yang menunjukkan persamaan perasaan karena tekanan-tekanan kolonial. Adapun yang kedua adalah faktor eksternal, yakni perkembangan dunia umumnya. Namun, baik faktor internal maupun faktor eksternal itu tidak akan banyak berperan sekiranya tidak banyak faktor intelektualitas yang muncul dalam panggung organisasi politik. Sebagai elit baru, tentu saja mereka menghendaki masyarakat yang bebas dari pengawasan kolonial, yang dengan sadar ingin mengubah kedudukan bangsanya.

Pembentukan organisasi-organisasi sebagai aktualisasi dari gerakan nasional mendapat perhatian dari bangsa Indonesia. Kekuatan-kekuatan sosial-politik yang ada dengan beragam orientasi, seperti berorientasi etnis, agama, bangsa, dan ideologi mulai bermunculan.

Kelompok yang berorientasi etnis ditandai dengan tampilnya Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Java, dan Budi Utomo. Kelompok yang berorientasi agama melengkapi gejala ini dengan munculnya Sarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka yang berorientasi pada bangsa membentuk *Indische Partij* (IP), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (Partindo), dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Kemudian yang berorientasi pada ideologi membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Indonesia (Pari). Kekuatan-kekuatan ini tampil secara mengesankan pada dua puluh tahun pertama abad ke-20 di Hindia Belanda.²³

Organisasi yang memusatkan orientasinya ke etnis dan bangsa, anggotanya terdiri atas kaum terpelajar di kota. Organisasi-organisasi Islam menggarap

²² A.K Pringgodigdo. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. Cetakan ke-9, hlm. x-xi.

²³ Sudjarwo. 1985. "Digul sebuah Filter Radikalisme; Potret Dinamika Pertumbuhan Dinamika Pertumbuhan Bangsa", *Seminar Sejarah Nasional IV*, di Yogyakarta tanggal 16 s.d. 19 Desember 1985, hlm. 3.

pedagang, petani, dan kaum terpelajar dengan basis kota dan desa sebagai anggota. Organisasi ideologi bergerak di kalangan buruh dan gerakan mereka diwarnai oleh demonstrasi massa di kota-kota.

Dalam perkembangannya, di antara organisasi-organisasi tersebut ada yang mengambil sikap konfrontatif dan cenderung revolusioner dalam menghadapi pemerintahan kolonial. Sikap ini diambil karena mereka berkeyakinan bahwa kemerdekaan itu harus direbut, dan tidak mungkin diberikan begitu saja oleh Belanda. Sekalipun suatu waktu pemerintah kolonial Belanda memberikan janji-janji dan harapan-harapan, namun itu hanyalah merupakan suatu upaya untuk menenteramkan situasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan mudah dari kamus politik mereka yang dipakai untuk menjawab tuntutan-tuntutan kaum nasionalis, seperti “terlalu pagi”, “dalam waktu yang akan ditentukan”, “belum masak”, “harapan yang dibesar-besarkan”, dan sebagainya.²⁴ Demikian juga “janji palsu” Gubernur Jenderal van Limburg Stirum tahun 1918. Kegagalan pembaharuan konstitusional tahun 1922 untuk mengadakan perubahan-perubahan penting, penolakan *Staten Generaal* pada tahun 1925 terhadap pasal dalam rancangan undang-undang yang memungkinkan orang Indonesia menjadi mayoritas dalam *Volksraad*, semuanya menyebabkan merosotnya kepercayaan mereka kepada Belanda.²⁵

Hal tersebut merupakan bukti bahwa Belanda bermaksud memperpanjang kekuasaan kolonial mereka melalui segala jalan yang sekiranya dapat ditempuh.

Dengan melihat aktivitas organisasi-organisasi sosial-politik yang semakin radikal dan revolusioner, dan itu merupakan ancaman yang serius bagi pemerintah kolonial, maka dalam usaha mengendalikan mereka pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan-peraturan yang sangat keras. Dilakukan penahanan secara besar-besaran, orang-orang yang dicurigai dipenjarakan, banyak di antara mereka itu dibuang atau ditawan. Hak mengadakan pertemuan dibatasi dan pers disensor dengan ketat. Pertemuan-pertemuan harus dihadiri oleh anggota-anggota

²⁴ Sartono Kartodirdjo. 1972. *op. cit.*, hlm. 47.

²⁵ John Ingleson. 1983. *Jalan ke Pengasingan; Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927 - 1934*. Jakarta: LP3ES, hlm. 9.

polisi yang diberi kekuasaan untuk membubarkan apabila pertemuan itu dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Pada akhir pemberontakan PKI 1926/1927, tidak kurang dari 13.000 orang ditangkap. Dari jumlah itu 4.500 orang dipenjarakan, 1.300 orang diasingkan, 823 orang dibuang ke Digul, dan sisanya dibebaskan.²⁶ Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya banyak tokoh nasionalis yang dipenjarakan dan diasingkan, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan yang lainnya.

Karena pemimpin-pemimpin nasionalis yang bergerak dalam lapangan politik banyak yang ditahan dan diasingkan, maka perlawanan politik dianggap kurang efektif. Sebagai alternatif, perlawanan lewat pendidikan²⁷ untuk menanamkan benih-benih nasionalisme kepada murid-murid pribumi dianggap sebagai suatu hal yang sangat *urgent*.

Pemikiran semacam itu ternyata mendapat sambutan positif, terbukti pada anggaran dasar beberapa organisasi memprogramkan pendidikan, juga berdirinya beberapa kelompok studi; seperti Kelompok Studi Indonesia yang didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1924, Kelompok Studi Umum di Bandung didirikan pada tanggal 29 November 1925.²⁸ Dalam hal ini pun Bung Hatta selalu menekankan pentingnya pendidikan secara bertahap bagi rakyat Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk menjadi bangsa yang merdeka.²⁹

Perintis Kebangkitan Gerakan Sosial Pendidikan

Sebagaimana dikatakan terdahulu, bahwa nasionalisme itu muncul sebagai jawaban terhadap sistem kolonial. Demikian juga halnya dengan sistem pendidikan nasional; ia muncul sebagai jawaban terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada pada sistem pendidikan kolonial.

²⁶ George McTurnan Kahin. *op. cit.*, hlm. 86, dan bandingkan dengan Kooyman (ed.). 1977. *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Idayu, hlm. 19.

²⁷ Sri Sutjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo. 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 147.

²⁸ John Ingleson. *op. cit.*, hlm. 21.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

Pada masa kolonial terdapat dua macam sekolah, yaitu sekolah-sekolah yang didirikan serta dipelihara pemerintah yang disebut *gouvernemenscholen* (sekolah gubernemen) dan yang lain *particulierescholen* (sekolah partikelir) yaitu sekolah yang didirikan oleh swasta.³⁰ Sekolah partikelir pun ada dua macam, ada sekolah partikelir yang diberi subsidi oleh pemerintah dan sekolah partikelir yang tidak diberi subsidi. Adapun yang diberi subsidi oleh pemerintah ialah sekolah yang didirikan dan dijaga oleh suatu perkumpulan yang telah diakui oleh pemerintah dan diberi hak *recht-persoon*, atau oleh suatu perkumpulan yang berada di luar tanah Hindia Belanda, asal mempunyai cabang di Hindia Belanda dan memberitahukan keadaan cabang itu kepada *Directur van Onderwijs en Eeredienst*.³¹

Sekolah-sekolah partikelir yang diberi subsidi oleh pemerintah, umumnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja, baik Protestan maupun Katolik, dan sedikit diberikan kepada sekolah-sekolah Islam.³² Sebagai gambaran mengenai perbedaan jumlah subsidi yang diberikan kepada sekolah-sekolah partikelir adalah dalam tahun 1938-1939 telah diberikan subsidi kepada 2.016 sekolah Protestan, 728 sekolah Katolik, dan 133 sekolah Islam.³³

Munculnya sekolah-sekolah partikelir adalah sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Netral terhadap agama;

³⁰ "Sekolah Particulier", *Oetoesan Hindia*, No. 72, Selasa, 13 April 1915.

³¹ *Besluit Gubernur Jenderal*, tanggal 11 Agustus 1913, termuat dalam *Staatsblad* no. 524, dalam *Oetoesan Hindia*, No. Extra, Jumat 16 April 1915.

³² Sekolah Islam yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dalam bahasan selanjutnya, yang dimaksud dengan sekolah partikelir di sini adalah sekolah partikelir yang dikelola oleh kelompok nasionalis, bukan oleh gereja. Lihat Karel A. Steenbrink. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Terjemahan Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Jakarta: LP3ES, hlm. 52.

³³ *Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch Indie over het Schooljaar 1938-1939*, dalam Selo Sumarjan. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 279.

2. tidak terlalu memikirkan bagaimana caranya hidup secara harmonis dalam dunia, tetapi terutama menekankan tentang bagaimana memperoleh kehidupan;
3. diselenggarakan berdasarkan perbedaan-perbedaan kelompok etnis yang di dalam masyarakat;
4. diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Hindia Belanda, terutama di kalangan orang Jawa;
5. sebagian besar diarahkan pada pembentukan kelompok elit masyarakat yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negara jajahannya, dan dengan demikian benar-benar mencerminkan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda.³⁴

Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo mengemukakan ciri-ciri sistem pendidikan kolonial sebagai berikut:

1. Tidak diperuntukkan bagi semua anak pribumi, tetapi terbatas pada anak pribumi golongan elit dan anak pribumi yang dicalonkan menjadi pegawai pemerintahan kolonial;
2. sistem pendidikan kolonial yang intelektualistis dan individualistis kurang memperhatikan keterampilan dan kepentingan hidup bersama;
3. adanya diskriminasi pendidikan yang membedakan sekolah untuk anak-anak Belanda dan kulit putih lainnya yang serba cukup, sedangkan sekolah untuk anak-anak pribumi kurang memadai dan terbatas jumlahnya.³⁵

S. Nasution mengemukakan ciri umum sistem pendidikan kolonial antara lain sebagai berikut: bersifat dualisme, gradualisme, konkordansi (yang memaksa semua sekolah berorientasi Barat mengikuti model sekolah di Nederland dan menghalangi penyesuaian dengan keadaan di Hindia Belanda; setiap sekolah menjadi agen kebudayaan Barat), dan pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 278.

³⁵ Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo, *loc. cit.*

³⁶ S. Nasution. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars, hlm. 145-146.

Dari ketiga pendapat tersebut, secara garis besar sistem pendidikan kolonial itu dapat disimpulkan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Netral terhadap agama. Hal ini antara lain disebabkan karena di negeri Belanda sendiri telah timbul pertentangan yang sudah lama berjalan tentang pemberian pelajaran agama di sekolah-sekolah, sehingga lahirlah Undang-undang tahun 1857 yang menghapuskan semua pelajaran agama di sekolah. Dengan sendirinya sikap netral terhadap agama ini dibawa juga ke Indonesia.³⁷
2. Bersifat diskriminatif.
3. Materi pelajaran yang diberikan lebih bersifat kebelandaan; seperti sejarah raja dan ningrat Belanda, geografi negara Belanda, nyanyian orang-orang Belanda, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan orang-orang Indonesia merasa asing terhadap kebudayaannya sendiri.³⁸
4. Makin tampak tujuan didirikannya sekolah-sekolah pemerintah, yakni menghasilkan tenaga pegawai atau tenaga buruh untuk pemerintah kolonial atau perusahaan-perusahaan swastanya.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut dibentuklah sekolah-sekolah yang berhaluan agama, politik, budaya, dan sekolah keterampilan. Sekolah-sekolah yang berhaluan agama muncul dan dikelola oleh ormas keagamaan, seperti Jamiat Khair (1905), Persatuan Umat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1913), Miftahul Anwar (1916), Persatuan Islam (1920), Nahdlatul Ulama (1926)³⁹, dan yang lainnya. Demikian juga sejumlah madrasah, pesantren, dan majelis-majelis taklim lainnya yang tersebar di beberapa daerah di Jawa. Sekolah-sekolah yang berhaluan kebudayaan seperti Taman Siswa (1922), Bale Pawulangan Pasundan (1914), dan sebagainya. Yang berhaluan politik seperti antara lain sekolah-sekolah Sarekat Islam (1921), *Ksatrian Instituut* (1924). Sekolah keterampilan seperti *Indische Neder-landsche School* (INS).

³⁷ M. Said. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya*. Jakarta: Mutiara, hlm. 49.

³⁸ Margono Djohadikusumo. 1969. *Kenang-kenangan dari Tiga Zaman; suatu Kisah Kekeluargaan Tertulis*. Djakarta: Indira, hlm. 11.

³⁹ Deliar Noer. 1980. *op. cit.*, hlm. 38-104; juga I. Djumhur dan HLM. Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Ilmu, hlm. 162-184.

Sekolah Sarekat Islam

Pada akhir Februari 1921, Tan Malaka tiba di Batavia setelah ia bekerja sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh Deli & Svembah Maatschappij (1920-1921). Cita-cita untuk mendirikan sekolah sendiri telah ada padanya, tetapi ia masih memerlukan kebebasan untuk dapat bekerja, mendapatkan murid sendiri, ruang kelas dan alat-alat. Kecuali itu, ia menganggap perlu mendapatkan lingkungan masyarakat yang akan membantu usahanya.

Di Batavia ia membicarakan maksudnya itu dengan mantan gurunya G.H. Horensma,⁴⁰ dan ia menyatakan persetujuannya dan memberikan dorongan. Kemudian ia pergi ke Yogyakarta, dan bertemu dengan R. Sutopo, redaktur kepala Surat Kabar Budi Utomo. Sutopo menghendaki agar Tan Malaka dapat memimpin suatu sekolah yang akan didirikan di kota itu. Selain bertemu dengan Sutopo, ia juga berjumpa dengan para pemimpin SI yang sedang berkongres di kota itu, antara lain: HOS Cokroaminoto, Semaun, Darsono. Semaun juga menawarkan kepada Tan Malaka untuk memimpin sekolah yang akan didirikan di Semarang.⁴¹

Pada bulan Maret 1921, di dalam rapat SI-Semarang, Semaun telah mengajukan pokok pembicaraan agar didirikan sekolah bagi anak-anak SI. Akhirnya, pada tanggal 21 Juni 1921 dibentuklah sekolah SI di Semarang, dengan ruang sidang gedung SI-Semarang sebagai ruang kelas. Pemimpin sekolahnya ialah Tan Malaka.⁴² Murid pertamanya berjumlah 50 orang.

⁴⁰ G.H. Horensma, sejak tahun 1906 bekerja sebagai guru di *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers* (Sekolah Guru untuk Guru-guru Bumiputera) di Fort de Kock, yaitu kota Bukittinggi sekarang. Lihat Yusmar Basri (ed.). *op. cit.*, hlm. 257.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 258. Lihat juga Alfian, "Tan Malaka; Pejuang Revolusioner yang Kesepian", dalam Taufik Abdullah *et al.* (red.). 1981. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, hlm. 145.

⁴² Surat Residen Semarang tanggal 27 Oktober 1921 No. 425. Lihat S.L. van der Wal. 1963. *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch Indie 1900-1942*. Goringen: Een Bronnenpublikatie, hlm. 365 catatan 9, dalam Yusmar Basri (ed.). *loc. cit.*

Tujuan Sekolah SI adalah:⁴³

1. Memberi bekal yang cukup, agar anak didik dapat mencari penghidupannya dalam dunia kapitalis (dengan memberikan pelajaran berhitung, menulis, membaca, sejarah, ilmu bumi, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan sebagainya).
2. Memberikan hak kepada murid-murid untuk bersukaria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan.
3. Menunjukkan kewajiban terhadap berjuta-juta kaum kromo.

Dengan demikian, maka sekolah SI tidak melaksanakan suatu sekolah semata-mata, tetapi menginginkan suatu haluan pendidikan, yang sesuai dengan haluan SI-Semarang. Maksudnya ialah mencari suatu bentuk pendidikan yang bisa mendatangkan manfaat bagi rakyat di seluruh Indonesia. Dalam hubungan ini, pendidikan calon-calon guru sekolah SI mendapat perhatian khusus.

Dalam sekolah SI, ikatan politik mendapat binaan yang intens, karena kenyataan bahwa sekolah-sekolah didirikan dan diusahakan oleh SI, murid-muridnya berasal dari anak para anggota SI, yang dididik dengan tujuan bahwa mereka kelak akan berdampingan dengan rakyat dalam perjuangan ekonomi dan politik.

Pada waktu keberangkatan Tan Malaka ke Nederland sebagai buangan politik (1922),⁴⁴ di Indonesia telah ada 12 sekolah SI yang tersebar di berbagai tempat. Tiap tempat rata-rata menampung lebih kurang 250 orang murid, sehingga jumlah murid seluruhnya ada lebih kurang 3.000 orang.⁴⁵

Rahasia kemajuan pesat sekolah SI antara lain disebabkan karena pemerintah sendiri belum mampu untuk mengadakan sekolah yang mencukupi untuk penduduk pribumi. Akan tetapi lebih dari itu adalah kenyataan bahwa berdirinya sekolah-sekolah itu sejalan dengan perkembangan SI sebagai organisasi massa, serta kesadaran yang mulai tumbuh mengenai pentingnya pengajaran.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 259.

⁴⁴ Alfian, *op. cit.*, hlm. 116.

⁴⁵ Yusmar Basri (ed.). *op. cit.*, hlm. 262.

Setelah terjadi perpecahan di dalam SI, maka pada bulan April 1924 sekolah-sekolah SI menjadi Sekolah Rakyat. Tindakan-tindakan pemerintah jajahan menyebabkan banyak Sekolah Rakyat ditutup atau diserahkan kepada badan lain.⁴⁶

⁴⁶ Sekolah Rakyat di Bandung, umpamanya, diserahkan kepada Soekarno, yang kemudian diserahkan kepada Taman Siswa.

Daftar Sumber

- Alfian, 1981.
“Tan Malaka; Pejuang Revolusioner yang Kesepian”, dalam Taufik Abdullah *et al.* (red.). 1981. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Besluit Gubernur Jenderal*, tanggal 11 Agustus 1913, termuat dalam *Staatsblad* no. 524, dalam *Oetoesan Hindia*, No. Extra, Jumat 16 April 1915.
- Djailani, Anton Timur. t.t.
“The Background of Indonesia Nationalism”, *Mizan: Indonesian Forum for Islamic and Social Studies*
- Djojohadikusumo, Margono. 1969.
Kenang-kenangan dari Tiga Zaman; suatu Kisah Kekeluargaan Tertulis. Djakarta: Indira.
- Djumhur, I. dan HLM. Danasuparta. 1976.
Sejarah Pendidikan. Bandung: Ilmu.
- Hasymi, A. 1986.
“Syarikat Islam: Organisasi Modern Tertua di Aceh”, *Harmonis*, No. 335 thn. XVI-Thn. RI XLI, 1-4 Maret – 19 Jumadil-akhir 1406.
- Ingleson, John. 1983.
Jalan ke Pengasingan; Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927 - 1934. Jakarta: LP3ES
- Kahin George McTurnan. 1959. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca-New York: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1972.
“Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad-19 dan Abad-20”, *Lembaran Sedjarah*, Nomor 8 Djuni. Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Kohn, Hans. 1976.
Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya. Terjemahan Sumantri Mertodipuro. Jakarta: Pembangunan.

- Korver, A.P.E. 1985.
Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil? Terjemahan Grafitipers. Jakarta: Grafitipers.
- Muhsin Z., Mumuh. 2010.
Gerakan Pendidikan, Elit Intelektual, dan Nasionalisme. Bandung: YMSI.
- Noer, Deliar. 1980.
Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900 – 1942). Jakarta: LP3ES.
- Nur, Aminuddin.
Pengantar Study Sedjarah Pergerakan Nasional. Djakarta: Pembimbing Massa.
- Pringgodigdo, A.K. 1980.
Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Cetakan ke-9. Jakarta: Dian Rakyat.
- Said, M. 1981.
Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan. Jakarta: Mutiara.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985.
Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Terjemahan S. Rumbo. Jakarta: Sinar Harapan.
- “Sekolah Particulier”, *Oetoesan Hindia*, No. 72, Selasa, 13 April 1915.
- Stoddard, Lothrop. 1966.
Dunia Baru Islam. (The New World of Islam). Djakarta: Panitia Penerbit Menko Kesedjahteraan.
- Sudjarwo. 1985.
 “Digul sebuah Filter Radikalisme; Potret Dinamika Pertumbuhan Dinamika Pertumbuhan Bangsa”, *Seminar Sejarah Nasional IV*, di Yogyakarta tanggal 16 s.d. 19 Desember 1985.
- Sutjiatingsih, Sri dan Sutrisno Kutoyo. 1980/1981.
Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Steenbrink, Karel A.. 1986.
Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Terjemahan Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Jakarta: LP3ES,

Suyatno. 1985.

“Timbul dan Perkembangan Nasionalisme Indonesia”, *Basis*, November-xxxiv-II.

van der Wal, S.L. 1963.

Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch Indie 1900-1942. Goringen: Een Bronnenpublikatie.